

**PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA DALAM PENGEMBANGAN
BUDI DAYA IKAN LELE BERBASIS POTENSI LOKAL DI DESA
KUJANGSARI, KECAMATAN LANGENSARI, KOTA BANJAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:
DIMAS WAHYU AGUNG PRASETYO
NIT. 21303727

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

Agrarian reform is a strategic instrument aimed at achieving social justice and improving community welfare through the reorganization of land ownership, control, use, and utilization. Within this context, access reform plays a crucial role in optimizing the use of land distributed to communities through the agrarian reform program. In Kujangsari Village, Langensari Subdistrict, Banjar City, the local potential of freshwater catfish farming offers a significant opportunity to be developed as part of an economic empowerment strategy. This study is motivated by the importance of maximizing that potential to support local welfare through stakeholder collaboration in implementing access reform. The main research problems addressed are: how the access reform program is structured, how catfish aquaculture is being developed based on local potential, and what social, economic, and environmental impacts the program produces.

This study employs a descriptive qualitative approach to explore in depth the implementation of agrarian reform access arrangements in the catfish aquaculture sector. Data were collected through in-depth interviews with key informants, field observations, and document analysis. The research site was purposively selected in Kujangsari Village, which has entered the third phase of access reform—business mentoring. The study adopts the theoretical framework of collaborative governance to examine stakeholder cooperation, and also utilizes the concept of community empowerment based on local potential to analyze the program's strategy and effectiveness. The data were analyzed thematically to identify patterns of collaboration and their impacts on local socio-economic changes.

The results show that the agrarian reform access program in Kujangsari Village has progressed to the business mentoring stage, involving various parties such as government agencies, farmer groups, and local departments in the form of training, production support, and marketing of catfish products. The collaboration has led to institutional strengthening within the community and supported the growth of microenterprises based on village potential. The outcomes include increased income, strengthened social capital, and more sustainable management of local resources. In conclusion, the agrarian reform access program through catfish aquaculture in Kujangsari Village has proven to be an effective empowerment model, demonstrating that multi-stakeholder synergy plays a vital role in optimizing assets and enhancing community welfare based on local potential.

Keywords: *Agrarian Reform, Access Reform, Catfish Aquaculture, Local Potential, Community Empowerment*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Literatur	8
B. Kerangka Teoretis	18
1. Reforma Agraria	18
2. Penataan Akses Reforma Agraria	20
3. Kolaborasi	22
4. <i>Stakeholder</i>	26
5. Pemberdayaan Masyarakat	27
6. Budi Daya Perikanan Lele	30
7. Potensi Lokal	31
8. Dampak Penataan Akses Reforma Agraria	32

C. Kerangka Pemikiran	35
D. Pertanyaan Penelitian.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Format Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Definisi Operasional	40
D. Informan dan Kriteria dari Informan	41
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Analisis data	47
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	52
A. Sejarah Desa Kujangsari.....	52
B. Kondisi Geografis Desa Kujangsari	53
C. Kondisi Demografis.....	55
D. Sektor Usaha di Desa Kujangsari	59
BAB V PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA	61
A. Bentuk Program Penataan Akses Reforma Agraria	61
B. Upaya Pengembangan Budi Daya Ikan Lele Berbasis Potensi Lokal	87
C. Dampak Penataan Akses Reforma Agraria.....	95
BAB VI PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reforma Agraria merupakan kebijakan yang berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan ulang hubungan masyarakat dengan tanah, yang mencakup aspek penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya tanah. Reforma Agraria di Indonesia itu sendiri sebenarnya sudah dimulai setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam pelaksanaan reforma agraria di Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria merupakan landasan hukumnya. Menurut Tehupeiory (2023), Penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan cara mengedepankan keadilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang merupakan definisi dari reforma agraria. Selain itu, program reforma agraria dikenal juga sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa tanah dan mengatasi masalah ketimpangan, lembaga pemerintah dan masyarakat bersinergi dalam program yang terencana dan terorganisir guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

Penataan aset dan penataan akses merupakan dua langkah utama yang akan memfasilitasi pelaksanaan reforma agraria. Melegalkan aset akan menjadi langkah pertama untuk melaksanakan penataan aset. Sertipikat tanah akan menjadi produk utama dari upaya ini. Bank akan menyediakan dana bagi masyarakat yang memiliki sertipikat tanah sehingga mereka dapat memulai usaha mereka (Ramadhan dan Octarina, 2022). Menurut Utomo (2021) Program Reforma Agraria saat ini mengatur sumber daya dan akses sedemikian rupa sehingga interpretasi reforma agraria secara keseluruhan tidak hanya mencakup pemberian sertipikat kepada masyarakat, tetapi juga menentukan sejauh

mana sertifikat tersebut memberikan dampak ekonomi pada tanah yang dimiliki. Membangun kerja sama yang sinergis dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan reforma agraria, membentuk kelompok kerja pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, menyediakan berbagai fasilitas yang sangat mendorong kegiatan pemberdayaan masyarakat dan *access reform*, membantu pemasaran dengan memperkenalkan *event-event* besar di daerah tersebut dan pemasaran secara online, menjembatani akses pinjaman modal usaha berdasarkan data subjek *by name by address* penerima redistribusi tanah (Saheriyanto & Suhaimi, 2021)

Pemerintah saat ini melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam Petunjuk Teknis Penataan Akses Reforma Agraria Tahun 2024, dengan nomor juknis: 2/Juknis-500.TU.01.02/XII/2023, Penataan Akses adalah program pemberdayaan ekonomi untuk subjek Reforma Agraria yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan tanah. Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program ini dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya, serta melalui kebijakan dan program yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka, dengan fasilitasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Penataan akses reforma agraria terdiri dari 3 fase, fase 1 yaitu pemetaan sosial, fase 2 yaitu penataan kelembagaan, fase 3 yaitu pendampingan usaha.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan bagi desa untuk mengembangkan potensi yang ada secara mandiri, sesuai dengan kebutuhan lokal, guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong kemajuan desa menuju kemandirian, selain peran pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan (Astika dan Subawa, 2021). Menurut Saheriyanto &

Suhaimi (2021) pemberdayaan ekonomi melalui penataan akses reforma agraria ini juga dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan nasional, karena pengelolaan sumber daya tanah yang lebih optimal akan mendorong produktivitas dan efisiensi dalam sektor pertanian serta sektor-sektor lainnya yang terkait.

Pendapatan nasional dapat ditingkatkan serta dimaksimalkan dengan potensi lokal, dimana potensi lokal termasuk aset nasional. Dengan memaksimalkan potensi lokal, kesejahteraan masyarakat juga dapat tercapai (Fathony, 2022). Penggalan potensi daerah yang tepat, dapat memberikan peluang yang baik dalam mengembangkan potensi daerah, sehingga dapat membuka peluang usaha bagi warga (Fitriana dkk., 2022). Menurut Putri & Suminar (2023), Proses pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal dilakukan melalui tahapan penyadaran dan pembentukan perilaku, transformasi kemampuan dan keterampilan, serta pengayaan/kemampuan intelektual. Melalui program pemberdayaannya, terwujud masyarakat yang mandiri dengan melihat berbagai potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah atau kelompok masyarakat yang dapat dimanfaatkan dengan melakukan berbagai pengembangan dan inovasi serta pembaharuan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Perikanan budi daya termasuk dalam potensi lokal, khususnya budi daya ikan lele air tawar. Penataan akses reforma agraria menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pemerataan distribusi sumber daya alam, termasuk dalam pengelolaan lahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat budi daya ikan. Menurut Mashur dkk. (2020) Di bidang budi daya ikan air tawar, program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan sekaligus meningkatkan produksi ikan air tawar yang berkualitas tinggi. Salah satu sektor ekonomi masyarakat yang paling potensial adalah budi daya

ikan air tawar. Pemerintah mendukung penuh hal ini dalam rangka memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan baik.

Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjar tentang hasil pencacahan lengkap sensus pertanian 2023, sektor perikanan di wilayah tersebut menunjukkan potensi untuk dikembangkan. Di Kota Banjar, terdapat sejumlah rumah tangga yang terlibat dalam usaha perikanan, dengan total 1.948 rumah tangga yang melakukan budi daya ikan pada tahun 2023, sehingga menjadikan daerah ini sebagai lokasi yang strategis untuk pemberdayaan tanah masyarakat Bentuk dari pemberdayaan tanah masyarakat berupa budi daya ikan. Menurut Faozan (2017) Pelibatan pengelola dan masyarakat dalam merumuskan program yang mempertimbangkan potensi daerah di Kota Banjar menghasilkan program Kursus Wirausaha Desa (KWD) dalam meningkatkan kemandirian usaha di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dengan fokus pada perikanan darat. Keberhasilan program SKB Kota Banjar terlihat dari adanya output yang dihasilkan yaitu salah satunya menghasilkan kelompok perikanan darat gurame di kecamatan Purwaharja Kota Banjar yang merupakan program dari KWD.

Dalam pelaksanaan penataan akses reforma agraria di Kota Banjar pada tahun 2024, terdapat 2 lokasi penataan akses reforma agraria. Desa Waringinsari dan Desa Kujangsari merupakan 2 lokasi penataan akses reformaa agraria di Kota Banjar pada 2024, terletak pada kecamatan yang sama. Pada penelitian ini, Peneliti lebih memilih Desa Kujangsari sebagai lokasi penelitian, karena desa ini merupakan salah satu contoh penataan akses reforma agraria yang memanfaatkan potensi lokal, baik dari segi fisik maupun non-fisik. Penataan akses reforma agraria di Desa Kujangsari dilakukan penerapan kolaborasi dalam proses pemberdayaan tanah masyarakatnya. Pemberdayaan kemitraan yang memerlukan dukungan dari berbagai sektor untuk pelaksanaannya. Menurut Sholihah dkk. (2024) Kemitraan merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang saling memberikan manfaat untuk menjalankan suatu

kegiatan secara bersama-sama. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Program pemberdayaan tanah masyarakat ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan lahan, serta menciptakan peluang ekonomi yang lebih produktif. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Mengingat tanah sebagai aset memiliki nilai dan manfaat yang luas, pemanfaatannya dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan produksi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Penataan Akses Reforma Agraria Dalam Pengembangan Budi Daya Ikan Lele Berbasis Potensi Lokal Di Desa Kujangsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, telah disebutkan bahwa pada tahun 2024 di Desa Kujangsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar dilaksanakan penataan akses reforma agraria yang sudah pada fase 3. Penataan akses reforma agraria diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dalam pelaksanaan penataan akses reforma, program pemberdayaan tanah masyarakatnya berupa budi daya ikan lele. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mencoba menguraikan dengan beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana bentuk program penataan akses reforma agraria pada sektor budi daya ikan lele di Desa Kujangsari?
2. Bagaimana upaya pengembangan budi daya ikan lele berbasis potensi lokal dalam program penataan akses reforma agraria di Desa Kujangsari?
3. Bagaimana dampak dari program penataan akses reforma agraria dalam pengembangan budi daya ikan lele di Desa Kujangsari?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Mengetahui pelaksanaan dan kolaborasi *stakeholder* penataan akses reforma agraria di Desa Kujangsari;
- b. Mengetahui upaya pengembangan usaha berbasis potensi lokal dalam program penataan akses reforma agraria di Desa Kujangsari;
- c. Mengetahui dampak program penataan akses reforma agraria budi daya ikan lele di Desa Kujangsari.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan wawasan tentang reforma agraria, khususnya dalam program penataan akses reforma agraria tentang pengembangan usaha budi daya ikan lele dengan memanfaatkan potensi lokal, baik dari potensi fisik maupun non fisik untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Manfaat Sosial

Secara sosial, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memberikan kontribusi pengetahuan, ide, serta langkah-langkah konkret untuk mengembangkan inisiatif usaha yang berbasis pada potensi lokal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kondisi ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

c. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran, masukan atau bahan evaluasi terhadap pihak pelaksana program penataan akses reforma agraria dalam pengembangan pemikiran terhadap pemecahan serta perumusan masalah yang lebih baik pada masa mendatang, sehingga dapat

mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam penataan akses reforma agraria pada sektor pengembangan usaha budi daya ikan lele berbasis potensi lokal.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk program penataan akses Reforma Agraria di Desa Kujangsari pada sektor budi daya ikan lele dilaksanakan melalui pemberian akses pemodalan, usaha dan produksi, serta akses pemasaran. Akses pemodalan diberikan dengan memfasilitasi pinjaman bank, baik tanpa agunan sertipikat tanah maupun dengan jaminan sertipikat hasil penataan aset. Pada aspek usaha dan produksi, masyarakat didampingi dalam pembuatan pakan mandiri serta mengembangkan budi daya ikan lele konsumsi menjadi produk siap saji lele siap goreng. Sedangkan pada akses pemasaran, difasilitasi penerbitan izin usaha dan sertifikasi halal agar produk dapat dipasarkan lebih luas dan legal.
2. Upaya pengembangan usaha budi daya ikan lele dalam penataan akses Reforma Agraria di Desa Kujangsari dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Strategi yang diterapkan meliputi peningkatan kapasitas teknis budi daya melalui pelatihan dan pendampingan, serta sarana produksi yang memadai. Selain itu, diversifikasi produk diupayakan untuk meningkatkan nilai tambah, seperti pengolahan lele konsumsi menjadi produk siap saji. Penguatan pemasaran juga didorong melalui legalitas usaha dan sertifikasi halal agar produk dapat bersaing di pasar yang lebih luas..
3. Dampak program penataan akses reforma agraria dalam pengembangan budi daya ikan lele berbasis potensi lokal dapat dilihat dari berbagai dampak, yaitu dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak lingkungan. Dari dampak sosial dapat dilihat dari bergabungnya masyarakat yang belum bergabung pada kelompok menjadi bergabung pada kelompok budi daya ikan “*Gemah Ripah Fish*”, dari dampak ekonomi dapat dilihat dari peningkatan pendapatan dan lebih efisien modal dalam melakukan budi daya ikan lele, dari dampak lingkungan

dapat dilihat dari pemanfaatan buah lokal yang berbentuk afkir guna mengurangi limbah organik.

B. Saran

1. Kantor Pertanahan Kota Banjar diharapkan dapat memperluas jaringan kerja sama dengan melibatkan lebih banyak pihak, agar pendampingan penataan akses reforma agraria semakin optimal dan berdampak luas.
2. Pemerintah daerah melalui Dinas terkait perlu mendorong inovasi lanjutan dalam pengembangan diversifikasi produk olahan berbasis teknologi yang tepat, pemanfaatan teknologi yang tepat berupa *market place* dan pemasaran digital, guna memperkuat nilai tambah hasil serta meningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas. Dengan kolaborasi antar *stakeholder*, diharapkan usaha berbasis potensi lokal, khususnya budi daya ikan lele dapat berkelanjutan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Pemerintah Desa Kujangsari sebaiknya terus menguatkan perannya dalam mengoordinasikan partisipasi masyarakat, agar program penataan akses reforma agraria berjalan optimal dan berkelanjutan. Sementara itu, desa atau kelurahan yang menolak program disarankan untuk mempertimbangkan kembali penolakan terhadap program pemberdayaan, dengan mengkaji potensi manfaat ekonomi dan sosial bagi warganya.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian pada desa atau kawasan lain yang memiliki karakteristik potensi lokal serupa, sehingga hasilnya dapat dibandingkan dan dijadikan rujukan pengembangan kebijakan di tingkat daerah. Selain itu, peneliti diharapkan dapat menggali lebih dalam dampak jangka panjang program penataan akses reforma agraria terhadap keberlanjutan usaha budi daya ikan lele, termasuk aspek pemasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rappana, Ed.). CV.Syakir Media Press.
- Aberg, M. (2000). Putnam's Social Capital Theory Goes East: A Case Study of Western Ukraine and L'viv. *Europe-Asia Studies*, 52.
- Afriliyeni, Sihaloho, M., & Sita, R. (2021). Hubungan Reforma Agraria Dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Kasus: Lahan Eks Hgu Di Desa Pasawahan, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat* |, 05, 433–449. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i2.726>
- Alvian, F., & Mujiburohman, D. A. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Jurnal Tunas Agraria*, 5(2). <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176>
- Arisaputra, M. I. (2016). Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial. *Jurnal Perspektif*, 21. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i2.188>
- Arnowo, H. (2025). Pola Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Reforma Agraria di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. *Tunas Agraria*, 8(1), 113–128. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i1.408>
- Arrozaaq, D. L. C. (2016a). *Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo)*.
- Arrozaaq, D. L. C. (2016b). *Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo)*.
- Astika, A. N., & Subawa, N. S. (2021). Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 5. <https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.223-232>
- Badan Pertanahan Nasional (BPN). Laporan Akhir *Field Staff* Penanganan Akses Reforma Agraria.
- Badan Pertanahan Nasional (BPN). Petunjuk Teknis Penataan Akses Reforma Agraria tahun 2024.
- Badan Pusat Statistik Kota Banjar. (2024). Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023.
- Badan Pusat Statistik Kota Banjar. (2024). Kecamatan Langensari dalam Angka 2024.
- Bisung, E., & Elliott, S. J. (2014). Toward a social capital based framework for understanding the water-health nexus. *Social Science & Medicine*, 108, 194–200. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2014.01.042>
- Darwis, R. S., Saffana, S. R., Miranti, Y. S., & Yuandina, S. (2022). Kewirausahaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pekerjaan Sosial e*, 4(2), 135–147. <https://doi.org/10.24198/focus.v4i2.37495>

- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The New Public Service: Serving Rather than Steering. *Public Administration Review*, 60(6), 549–559. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00117>
- Dobson, J., & Redman, J. (2025). Environmental wellbeing: A concept and principles for research, policy and action. *Local Environment*. <https://doi.org/10.1080/13549839.2025.2506587>
- Domri, D., Ridwan, R., & Jaya, M. (2019). Eektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.36355/jppd.v1i1.1>
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. *Jurnal MODERAT*, 6(1). <https://doi.org/10.25157/moderat.v6i1.3319>
- Faozan, F. N. (2017). Partisipasi Peserta Kursus Wirausaha Desa (KWD) Dalam Meningkatkan. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 13(2).
- Fathony, A. (2022). PKM Peningkatan Edukasi Ekonomi Kreatif melalui UMKM Kampung Snack dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Probolinggo. *GUYUB: Journal of Community Engagement*, 3(3). <https://doi.org/10.33650/guyub.v3i3.4843>
- Fatine, S. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Kota Dibidang Ekonomi Melalui Umkm Ladu Arai Pinang Di Lubuk Buaya Kota Padang. *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 1(2), 78–83. <https://doi.org/10.34312/ljpmt.v1i2.15346>
- Febrian, R. A. (2016). *Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep Dan Regulasi)*.
- Firman, A. A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Berbasis Komunitas. *Jurnal Tata Sejuta*, 7(1). <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v7i1.196>
- Fitriana, N., Yuniwati, E. D., Darmawan, A. A., & Firdaus, R. (2022). Artikel Hasil Pengabdian Pada Masyarakat Potensi Lokal Waduk Purboyo Menjadi Kawasan Wisata. 4, 224–229. <https://doi.org/10.37304/enggang.v3i2.8822>
- Granovetter, M. (1983). The Strength Of Weak Ties: A Network Theory Revisited. *Sociological Theory*. <https://doi.org/10.2307/202051>
- Gunawan Aji, Abdillah Dwi Prasetyo, Kausar Faida Rakhman, & Grecia Adis Vanessa. (2023). Pemberdayaan UMKM Halal melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pekalongan: Meraih Daya Saing Global Melalui Inovasi dan Kolaborasi. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(4), 412–420. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v1i4.739>
- Hastuti, K. P., Alviawati, E., Setiawan, F. A., Rahman, A. M., & Muhaimin, M. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal untuk Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat di Daerah Rawan Banjir. *Jurnal Pengabdian Inovasi Lahan Basah Unggul*, 1. <https://doi.org/10.20527/ilung.v1i3.4116>
- Kothari, C. R. (2004). *Research Metodology* (2 ed.). New Age International Publishers.
- Kurnia, T., Sibarani, J. C., Siagian, A. P., & Hidayat, N. (2024). Analisis Pengaruh Perubahan Demografi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Sosial Humaniora Sigli*, 7(1), 538. <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2404>

- Marjenah, Kustiawan, W., Nurhifitiani, I., & Sembiring, K. H. M. R. P. (2017). Pemanfaatan Limbah Kulit Buah-Buahan Sebagai Bahan Baku Pembuatan Pupuk Organik Cair. *Ulin-J Hut Trop*, 1(2), 120–127. <https://doi.org/10.32522/ujht.v1i2.800>
- Mashur, D., Azhari, F. M., & Zahira, P. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar di Kabupaten Pasaman. *Jurnal Niara*, 13(1), 172–179. <https://doi.org/10.31849/niara.v13i1.3969>
- Maulidiah, D. F., Said, M. M., & Hayat. (2023). Peran Dinas Koperasi , Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Umkm (Studi Sentra Industri Keripik Tempe Sanan Kota Malang). *Journal Of Publik Administration*, 17(9), 80–85.
- Mayang, R., Sutiah, E., & Hartini Melo, R. (2024). Kearifan Lokal Masyarakat Desa Torosiaje Terhadap Budidaya Perikanan. *Jurnal Penelitian Geografi (GeoJPG)*, 3(1), 17–25. <https://doi.org/10.3790/geojpg.v3i1.25757>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Albina, Ed.). Harfa Creative.
- Nopriono, & Suswanta. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Collaborative Governance. *JPK: Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, 1. <https://doi.org/10.18196/jpk.v1i1.7799>
- Nugroho, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria*. GRAMASURYA.
- Nugroho, A. (2023). Community Business Action Plan Based On Regional Potential In The Framework Of Agrarian Reform. *Injury: Interdisciplinary Journal and Humanity*, 2. <https://doi.org/10.58631/injury.v2i4.64>
- Nurhayati, S., Medaline, O., & Sari, A. K. (2022). Penataan Aset Dan Akses Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendaftaran Lahan Sistemik Lengkap. *Jurnal Rectum*. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i2.1882>
- Pandamdari, E. (2023). Penguatan Reforma Agraria Untuk Kemakmuran Rakyat Dalam Perspektif Hukum Tanah Nasional. *Jurnal Hukum Nawasena Agraria*, 1(1), 49–63. <https://doi.org/10.25105/jhna.v1i1.16592>
- Pemerintah Kota Banjar. (2025). Kondisi Hidrologi. <https://banjarkota.go.id/kondisi-hidrologi/>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
- Putri, D. P., & Suminar, T. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Pada Desa Wisata “Kampung Kokolaka” Kelurahan Jatirejo Kota Semarang. *Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, 3. <https://doi.org/10.37304/enggang.v3i2.8822>
- Putri, R. A., Sulastri, S., & Apsari, N. C. (2023). Pemanfaatan Potensi Lokal dalam Upaya Pencegahan Stunting. *International Journal Of Demos*, 5(1). <https://doi.org/10.37950/ijd.v5i1.394>
- Rahayu, A. D., & Amrin, R. N. (2022). Peran stakeholder dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener di kabupaten Wonosobo. *Tunas Agraria*, 5(3), 165–181. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.182>

- Ramadhan, M. R., & Octarina, N. F. (2022). Legalisasi Aset dalam Reforma Agraria di Kabupaten Malang. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(4), 1159–1174. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i4.2693>
- Rohman, M. L., & Astuti, P. (2019). Access Reform Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*.
- Saheriyanto, & Suhaimi, A. (2021). Pendampingan Dan Akses Modal Sebagai Strategi Access Reform Dari Tanah Pelepasan Kawasan Hutan Di Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Pertanahan*, 11. <https://doi.org/10.53686/jp.v11i1.47>
- Selznick, P. (1996). Institutionalism “Old” and “New.” *Administrative Science Quarterly*, 41, 270–277. <https://doi.org/10.2307/2393719>
- Sholihah, A. P., Hendrawijaya, & Hilmi, M. I. (2024). Pola Kemitraan Pentahelix Untuk Peningkatan Kompetensi Pemasaran Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. *Community Education Jurnal*, 7(2), 2615–1480. <https://doi.org/10.22460/commedu.v7i2.19509>
- Siahaan, N. H. T. (2004). Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan. Erlangga.
- Sinaga, E. H., Massardy, E., & Yulianto, T. (2023). Pengembangan Usaha Perikanan Melalui Penanganan Akses Reforma Agraria di Desa Tengkurak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. *Jurnal Pertanahan*. <https://doi.org/10.53686/jp.v13i2.220>
- Sitorus, N. I. B. (2020). Peran Dan Kolaborasi Stakeholder Pariwisata Dalam Mendukung Peningkatan Kunjungan Wisata Di Kawasan Danau Toba. *Jurnal Hospitality dan Pariwisata*, 6(2), 56–105. <https://doi.org/10.30813/.v6i2.2416>
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*.
- Sumanto, L. (2023). Dinamika Reforma Agraria Dalam Sejarah, Konsep Dan Implementasi. *Jurnal Hukum Nawasena Agraria*, 1(1), 39–48. <https://doi.org/10.25105/jhna.v1i1.16588>
- Supriyanto, Muh., & Wiwoho, R. D. (2017). Studi Kelayakan Usaha Dan Strategi Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Lele Di Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. *Jurnal AKSI*. <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.117>
- Tehupeiory, A. (2023). Reforma Agraria; Sumber Daya Agraria Untuk Kemakmuran Rakyat. *Jurnal ComunitÀ Servizio*, 5, 1527–1537. <https://doi.org/10.33541/cs.v5i2.5354>
- Titah, Asysyauki, A. H. A. T. Z. D., Alfitra, M. R., Dewa, M. J. P., A, A. M. P., Irjani, O. D., Febrianti, R. A., Arum, R. D., Marwansyah, M. R., Rahmadon, A., Setiawan, B., & Araujo, G. (2023). Budidaya Ikan Lele Dengan Menggunakan Waring Di Desa Penyandingan.
- Utomo, S. (2021). Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara. *Veritas et Justitia*, 7(1), 115–138. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3935>
- Yasintha, P. N. (2020). Collaborative Governance Dalam Kebijakan. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2219>